Bayar Pinjaman PEN Pembayaran TPP ASN Tertunda

Bayar Pinjaman PEN, Pembayaran TPP ASN Tertunda

Utang Capai Rp241 Miliar



TAKALAR, UPEKS--Utang Rp241 miliar yang diambil melalui program Pemuli-

han Ekonomi Nasional dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) oleh Pemerintah Daerah Takalar era kepemimpinan Syamsari Kitta (2022). Hal ini mulai berpengaruh pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu dampak pinjaman tersebut pembayaran

dibayarkan beberapa bulan tahun anggaran 2024. Kepala Badan Keuangan

TPP ASN terancam tak

dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Rahmansyah Lantara, saat dihubung melalui telepon selulernya. Minggu (15/09/24), mengatakan, utang PEN Pemkab Takalar tersebut bisa berdampak kepada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sejumlah program di OPD-OPD. "OPD-OPD saat ini merasakan dampak berkurangnya dana transfer. termasuk pembayaran TPP ASN terancam tak dibayarkan,†pungkasnya.

Namun soal pembayaran

sementara menghitung untuk

TPP ASN itu pihaknya



RAHMANSYAH LANTARA

dilakukan pembayaran kepada ASN dan tentunya mencarikan solusi terbaik. Rahmansyah Lantara menjelaskan Pemkab Takalar harus membayar cicilan utang PEN di tahun 2024 ini senilai Rp38 miliar, untuk tahun depan naik lagi menjadi Rp53 miliar sampai delapan tahun.

Rahmansyah Lantara menegaskan Pemkab Takalar sudah melakukan pinjaman Rp241 miliar di tahun 2022 dan pinjaman itu sudah mulai dicicil sejak 2023 sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Adapun anggaran Rp241 miliar itu menurut Rahmansyah Lantara digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Internasional di Galesong, dan pembangunan jalan di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Takalar. _ "Pendapatan Asli Daerah

"Pendapatan Asii Daeran (PAD) yang diharapkan dari Rumah Sakit Internasional itu belum ada, belum maksimal, itu kan harapannya kemarin dengan utang PEN ini karena kita ada pendapatan, peningkatan PAD dan itu belum maksimal," ujarnya.

Lebih jauh Rahmansyah Lantara mengatakan bahwa utang PEN Pemkab Takalar ini berpengaruh pada belanja APBD karena utang tersebut langsung terpotong dari Dana Alokasi Khusus (DAU). (Jah/suk)